



PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN BARITO SELATAN



Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 menunjukkan nilai 50,65 dengan predikat CC. Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor : B/1069/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7396361 - 7396362, FAKS (021) 7396323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 1069 /RB.06/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
di

Buntok

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 adalah 50,65 dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	7,50	8,01
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,08	4,78
	III. Reform	30,00	7,68	8,70
	Total Komponen Pengungkit	60,00	20,26	21,49

Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB 2022

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link Dokumen Terkait
1	2	3	4	5	6
1.	Melakukan kembali evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 untuk dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi saat ini;	Pemkab Barito Selatan telah melaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 060/267/Bag.I/ORG tanggal 16 Juni 2022 Hal Tindaklanjut Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah. Adapun dokumen-dokumen terkait telah disampaikan ke pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Biro Organisasi Sekretariat Daerah melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor: B.130/SETDA/AS.III-ORG/060/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 untuk kemudian diteruskan ke KemenPANRB.	Bagian Organisasi SETDA (Subkoordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan)	Dokumen-dokumen terkait evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 telah disampaikan ke KemenPANRB melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk perbaikan dokumen yang diminta KemenPANRB (telah disampaikan dalam bentuk softcopy melalui Biro Organisasi)	https://drive.google.com/drive/folders/1eDm_bKz26UrRs9LQj6WB6CfZyJugB5d6y



SALINAN

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyesuaian kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyesuaian kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

jdih.mempnas.go.id

Penajaman Road Map 2020-2024 melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor : B/98/RB.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 hal Tindak Lanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan *Road Map* Reformasi Tahun 2020-2024



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUKARNO KAV. 69, JAKARTA 12100
TELEPON (021) 7380361 - 7380362, FAKS (021) 7380323, SITUS <http://www.mempnas.go.id>

Nomor : B/98/RB.00/2023 28 Maret 2023
Hal : Tindak Lanjut Instansi Pemerintah
atas Perubahan *Road Map*
Reformasi Birokrasi 2020-2024

Yth,

1. Sekretaris Jenderal Kementerian;
2. Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
4. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Non Kementerian;
5. Asisten Perencanaan Umum Mabes TNI;
6. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;
7. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
8. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
9. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI;
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

di
Tempat

Pelaksanaan kebijakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 telah memasuki periode *Road Map* ketiga (akhir). Setiap periode (lima tahunan), pelaksanaan RB dilakukan berdasarkan pada kebijakan *Road Map* RB Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai acuan instansi pemerintah dalam mewujudkan RB secara nasional dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pada perencanaan dan

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor :319/SEKDA/AS.III-ORG/060/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Undangan Rapat Entry Data RB General dan RB Tematik



Rapat Pengumpulan Dokumen RB General dan RB Tematik Yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah
Website : <http://sekda.baritoselatankab.go.id> email : rganisasi@sekda.go.id
BUNTOK

Buntok, 10 Oktober 2023

Kepada

Nomor : B.319 /SEKDA/AS.III-ORG/060/10/2023 Yth. Kepala Perangkat Daerah
Sifat : Penting Kabupaten Barito Selatan
Lampiran : 1 (satu) berkas (Daftar Terlampir)
Perihal : Undangan Rapat Entry Data di -
RB General dan RB Tematik Tempat

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor : B/107/RB.01/2023 tanggal 15 September 2023 hal Sosialisasi Portal RB Penetapan Operator pada Portal RB (Lampiran II), dalam rangka pemenuhan data RB General dan RB Tematik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang selanjutnya akan disampaikan entry data melalui Portal RB Nasional.

Memperhatikan hal tersebut di atas, agar Saudara(i) menugaskan Sekretaris dan Bidang terkait serta membawa laptop untuk hadir membahas pemenuhan entry data dukung dimaksud, yang dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Oktober 2023
Pukul : 08.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Aula Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

EDY PURWANTO, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19750506 199311 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Pj. Bupati Barito Selatan di Buntok (sebagai laporan)

Untuk persiapan evaluasi RB, data yang kami siapkan adalah :

1. Draft *Perbup Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024
2. Dokumen Rencana Aksi yang sudah disiapkan yaitu terdiri dari :
 - a. RB General sebanyak 21 kegiatan utama
 - b. RB Tematik kami coba buat semua yaitu :
 1. Inflasi
 2. Investasi
 3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
 4. Pengentasan Kemiskinan
 5. Digitalisasi Pemerintahan Penanganan Stunting
3. Evaluasi LHE RB yang baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2023

Mohon petunjuk lebih lanjut. Terima kasih

Terima Kasih

TAMAN IRING WITU